

POLITIK TUNA ADAB DAN KETAHANAN POLITIK NASIONAL

Oleh

Fendi Nur Cahyo, Erinda Lamonti, Diah Ayu Utami, Dewi Kumalasari Amini, Fahrul Hamdani,
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

E-mail: fendinurcahyo26@gmail.com erindalamonti822@gmail.com,
diahayuutami190@gmail.com, kumalasari11de@gmail.com fahrulhaka22@gmail.com

Abstrak

Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Berawal dari peristiwa reformasi tahun 1998 saat ini Indonesia berada dalam era kebebasan berpolitik dan pada saat masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Berbicara mengenai politik tuna adab ini berkaitan dengan etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diakui sekarang ini yang terjadi adalah elit – elit politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegerawanan. Kurangnya etika berpolitik merupakan faktor utama merebaknya politik tuna adab di Indonesia, terlepas dari itu juga disebabkan dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai, lalu apa yang menjadi sebuah solusi dengan adanya fenomena tuna adab politik yang berakibat pada ketahanan politik nasional?. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberkan pemahaman atau memberikan solusi yang bisa ditawarkan dengan adanya fenomena tuna adab yang berakibat pada ketahanan politik nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum secara normatif yang dilakukan melalui pendekatan secara pendalaman pustaka atau materi yang diambil dari beberapa literatur serta pemahaman berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni Ketetapan MPR RI No. VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Patut untuk ditanamkan yang pertama adalah suatu kesadaran bahwa politik yang hendak kita perjuangkan bukanlah semata – mata politik kekuasaan melainkan suatu panggilan pengabdian terhadap bangsa demi kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga nilai – nilai luhur pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari – hari, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Politik berbudaya (Pancasila) juga diharapkan adanya masyarakat yang kritis, yang melihat perbedaan pandangan serta perdebatan sebagai suatu kewajiban. Penanaman etika yang mengedepankan keberadaban akan menimbulkan para politisi menjadi tidak buta adab terhadap politik yang nantinya akan berakibat pada ketahanan politik nasional.

Kata kunci : Politik, Etika dan tuna adab.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman di berbagai sektor yang meliputi: agama, ras, suku, bahasa, budaya dan lain – lain. Dengan keberagaman tersebut maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu pada sektor kehidupan berpolitik di Indonesia, dengan demikian telah dicontoh oleh para pendiri bangsa cara berpolitik mereka dengan cara sopan santun, tepa selira dan lain – lain. Namun cara – cara seperti itu sekarang ini sudah mulai luntur dan ditinggalkan.

Dewasa ini para elit politik cenderung melalaikan etika kenegarawanan, sehingga politik yang dilakukan menggunakan rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok serta mengabaikan kepentingan bersama. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bukan saja mengakibatkan pembunuhan karakter antara pemimpin nasional dengan cara menyerang pribadi pemimpin nasional, namun juga politik kekerasan akan terjadi.

Berbicara mengenai politik tuna adab ini berkaitan dengan etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diakui sekarang ini yang terjadi adalah elit – elit politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegerawanan. Namun hal tersebut tidak di hiraukan oleh para elit politik sekarang ini, karena para elit berasal dari partai politik atau kelompok yang sama dengan basis pendukungnya. Sehingga elit akan merasa tidak bersalah untuk menggunakan pendukungnya untuk mempermudah langkah politiknya.

Melihat kondisi politik sekarang ini kehidupan politik seolah olah jauh dari kesantunan dan etika dimana kepentingan pribadi lebih diutamakan dan mengabaikan kepentingan bersama sebagai bangsa. Maka hendaklah ditanamkan suatu kesadaran politik yang bukanlah semata – mata politik kekuasaan melainkan suatu panggilan pengabdian terhadap bangsa demi kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai – nilai luhur pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari – hari serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Lalu yang menjadi inti dari pembahasan adalah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan terhadap atau penanggulangan politik tuna adab terhadap ketahanan politik nasional?. Tentu akan menjadi sangat menarik untuk dibahas apabila para politisi yang tuna adab dan berakibat kepada ketahanan nasional, semuanya saling berkaitan karena apabila ketahanan kuat maka politik nasional juga sudah pasti kuat, karena pelaku politik tentu memiliki daya pemahaman yang baik terhadap adab dalam berpolitik. Tulisan ini mencoba memberika penawaran terhadap para politisi yang tuna adab terhadap politisi yang tuna adab dan akhirnya memberika efek tidak baik terhadap ketahanan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Politik dan Politik Tuna Adab

Mengenai definisi politik tentu kita akan menemukan berbagai pendapat para ahli. Karena definisi politik sendiri dapat dijabarkan secara luas oleh masing – masing para ahli. Dengan demikian definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang dalam suatu wilayah tertentu. Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda :

1. Politik sejatinya adalah cara untuk mencapai kekuasaan yang dilandasi oleh semangat pengabdian dan perjuangan dalam mewujudkan kebaikan umum.
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan Negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
3. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik ataupun hasil studi lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan menjawab rumusan masalah dari permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian definisi politik dapat mendefinisikan politik tuna adab, terdiri dari politik yang artinya cara mencapai kekuasaan dan tuna adab adalah tidak memiliki norma atau aturan, sehingga dapat diartikan politik tuna adab adalah cara mencapai kekuasaan Yang tidak menggunakan atau tidak mendasarinya dengan norma- norma yang sudah ada.

B. Definisi Ketahanan Politik Nasional

Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas , integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dengan demikian definisi ketahanan Politik nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berisi keuletan dan kegigihan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya dibidang politik.

METODE PENELITIAN

- A. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran hukum.

Dasar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan melalui dasar negara yaitu Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni Ketetapan MPR RI no VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian dilakukan dengan menganalisis studi kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, yakni MPR RI No. VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh melalui telah pendapat para ahli

tentang hukum, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus atau ensiklopedia dan sumber analisis.

C. Metode

Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu menganalisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahasan, dan tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Munculnya Politik Tuna Adab

Berawal dari peristiwa reformasi tahun 1998 saat ini Indonesia berada dalam era kebebasan berpolitik dan pada saat masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Dalam masa transisi ini terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam politik Indonesia, tetapi dalam perjalanan lambat laun tergerus oleh kepentingan – kepentingan pribadi atau kelompok. Ini dapat terlihat bagaimana saat ini para elit berkuasa lebih mudah menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Berbicara mengenai politik tuna adab ini berkaitan dengan etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diakui sekarang ini yang terjadi adalah elit – elit politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegerawanan. Sehingga mereka berpolitik tidak dilakukan menggunakan rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok serta mengabaikan kepentingan bersama. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bukan saja mengakibatkan pembunuhan karakter antar pemimpin nasional dengan cara menyerang pribadi pemimpin nasional, namun juga politik kekerasan akan terjadi. Namun hal tersebut tidak di hiraukan oleh para elit politik sekarang ini, karena para elit berasal dari partai politik atau kelompok yang sama dengan basis pendukungnya. Sehingga elit akan merasa tidak bersalah untuk menggunakan pendukungnya untuk mempermudah langkah politiknya.

Elit politik Indonesia sering mengabaikan etika berpolitik, sehingga mengakibatkan syahwat politiknya begitu besar sering membenturkan massanya (pendukung) yang sama – sama berlatarkan kaum primordial. Padahal dengan sama – sama kaum primordial kekuatan massa cenderung berimbang. Jika terus menerus dilakukan mereka tidak akan menang.²

Jauh sebelum merebaknya politik tuna adab ini, Indonesia terkenal dengan budaya sopan, santun, dan tepa selira. Semestinya perasaan atau budaya yang seperti itu harus digunakan pribadi maupun kelompok untuk mengendalikan perilaku berpolitik. Perasaan atau budaya halus seperti itu yang dirasakan hilang, terutama 4 tahun terakhir ini, digantikan dengan sumpah serapah, tuduhan – tuduhan keji, dan sarkasme yang serba kasar. Maka berlakulah

¹ Syafie Inu Kencana. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. 1998. Hlm. 34

² Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung. 2003. Hlm. 112

diktum atau frasa PERBEDAAN = PERMUSUHAN, tidak tanggung - tanggung rumah – rumah ibadat pun tak jarang digunakan untuk tujuan – tujuan politik tuna adab ini.

Jika keadaan seperti ini terus terjadi dan didiamkan dapat mengancam kestabilan ketahanan politik nasional Indonesia yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa karena masyarakat terus menerus di adu domba hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kurangnya etika berpolitik merupakan faktor utama merebaknya politik tuna adab di Indonesia, terlepas dari itu juga disebabkan dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Di Indonesia ini tidak banyak memiliki guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana esensi berpolitik yang tidak berorientasi terhadap perebutan kekuasaan saja, namun dengan penghayatan etika serta moral.

C. Solusi Untuk Mencegah Merebaknya Politik Tuna Adab

Mengingat perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan penuh pengorbanan sepatutnya kita merenung perihal perilaku berpolitik yang berbudaya. Hal ini muncul karena situasi politik belakangan ini, seolah – olah kehidupan politik jauh dari kesantunan dan etika dimana kepentingan – kepentingan pribadi dan kelompok mengabaikan kepentingan bersama sebagai bangsa.

Yang patut ditanamkan yang pertama adalah suatu kesadaran bahwa politik yang hendak kita perjuangkan bukanlah semata – mata politik kekuasaan melaikan suatu panggilan pengabdian terhadap bangsa demi kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga nilai – nilai luhur Pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari – hari, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Politik berbudaya (Pancasila) juga diharapkan adanya masyarakat yang kritis, yang melihat perbedaan pandangan serta perdebatan sebagai suatu kewajaran.

Komunikasi antara partai dan politikus serta masyarakat yang kritis, akan memperluas kesadaran baru dalam berbangsa dan bernegara, yang menjadikan era keterbukaan ini sebagai hal yang produktif, bukan semata - mata pertikaian dan luapan kebencian lantaran berbeda ideologi atau pandangan. Bila ini berlangsung dalam suatu proses yang berkelanjutan, jelaslah demokrasi kita tidak akan terjebak pada sekadar prosedural, melainkan sungguh - sungguh mewarnai kehidupan keseharian sosial politik negeri ini. Terbuka peluang, melalui serangkaian tahapan dan proses itu, para politikus bermetamorfosis menjadi para negarawan.³

Di samping itu harus disadari bahwa Indonesia adalah Negara republik yang masyarakatnya majemuk, multietnis dan multikultural, dengan ditambah lagi sedang melakukan percepatan perubahan yang disebabkan globalisasi, buah dari kemajuan teknologi informatika. Di sisi lain juga Indonesia juga memiliki bonus demografi yang memiliki keuntungan serta ancaman, untuk menghadapi ancaman kedepan diperlukan suatu pola (strategi) penanganan yang menyeluruh (holistik) dari seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Problematika bangsa saat ini, bukan hanya tanggung jawab presiden saja sebagai eksekutif melainkan seluruh komponen atau lembaga negara lain dan seluruh masyarakat.

Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis dan menghilangkan politik tuna adab antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar

³ Delors, J., et. al. *Learning: The Treasure Within*. Report to UNESCO of The International. 1996

kelompok kepentingan lainnya, untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara.⁴

Sebenarnya di Indonesia etika politik dan pemerintahan sudah ada pertauran yang mengaturnya yaitu dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam isi ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.⁵ Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara ini dimaksudkan agar membantu memberikan penyadaran tentang arti tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan mengedepankan pokok – pokok etika dalam berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, etos kerja, kedisiplinan, keteladanan, sportifitas, kemandirian, sikap toleransi, tanggung jawab, rasa malu, menjaga martabat kehormatan serta martabat diri sebagai warga Negara.

Dalam TAP MPR tersebut juga dinyatakan bahwa etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang jujur, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, TAP ini mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk mengamalkan etika kehidupan berbangsa. Untuk berpolitik dengan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara, paling tidak dibutuhkan dua syarat, yaitu ada kedewasaan untuk dialog dan dapat memomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok.

Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.⁶

PENUTUP

⁴ Budiarjo, Mariam. *DasarDasar Ilmu Politik*. Jakarta. 1997. Hlm. 98

⁵ Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

⁶ Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung.1989.hlm. 76

A. Kesimpulan

Definisi politik tuna adab yaitu terdiri dari politik yang mempunyai arti cara mendapatkan atau mencapai kekuasaan dan tuna adab yang berarti tidak memiliki norma atau aturan sehingga politik tuna adab dapat diartikan sebagai cara mencapai kekuasaan dengan tidak menggunakan atau tidak mendasarinya dengan norma atau aturan yang sudah ada.

Berkurangnya etika berpolitik adalah faktor utama merebaknya politik tuna adab di Indonesia, terlepas dari itu faktor lainnya yang menibulkan politik tuna adab adalah ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Di Indonesia, tidak banyak guru politik yang baik dan dapat mengajarkan bagaimana esensi berpolitik yang tidak berorientasi terhadap perebutan kekuasaan saja, namun dengan penghayatan etika serta moral

Sebenarnya dalam ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sudah diatur mengenai etika politik dan pemerintahan. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, efisien, dan efektif dan menumbuhkan suasana demokratis. Etika politik dan pemerintahan mempunyai misi yang ditujukan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk mempunyai sikap jujur, amanah, sportif, serta rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan rakyat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

Etika politik harus menjadi politik santun, cerdas, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

B. Saran

Dengan adanya peraturan mengenai tuna adab dalam politik didalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdapat di TAP MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang khususnya etika politik dan pemerintahan, diharapkan setiap warga negara mampu sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling dan saling toleransi di antara sesama manusia dan warga bangsa. Dan juga kepada para elit politik agar memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik. dan juga mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Dengan adanya berbagai tatanan etika didalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, semoga kehidupan politik Indonesia menjadi lebih bersih dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiarjo, Mariam. *DasarDasar Ilmu Politik*. Jakarta. 1997. Hlm. 98

Delors, J., et. al. *Learning: The Treasure Within*. Report to UNESCO of The International. 1996

Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung.1989.hlm. 76

Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung. 2003. Hlm. 112

Subakti Raiman. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. 1999.

Syafiie Inu Kencana. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. 1998. Hlm. 34

Undang-Undang

Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.